



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN
TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Jalan A.Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13950
No.Telp 021-22859672 ; Website : www.ptun-jakarta.go.id ; E-mail : ptun.jakarta@gmail.com

Nomor : 3256/KPTUN.W2.TUN1/PW1.1.1/VIII/2026 Jakarta, 31 Agustus 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Surat Pengantar Laporan Bulanan
Bulan Juli 2026

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Di –
Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, bersama ini kami sampaikan berkas laporan bulanan bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan untuk periode Juli 2026.

Berkas laporan ini sebagai bahan evaluasi dan monitoring guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian disampaikan untuk menjadikan periksa. Atas perhatian dan kerja sama, kami ucapkan terima kasih.



KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Ditandatangani secara elektronik

DANAN PRIAMBADA



Tembusan :
1. Arsip





**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA**



LAPORAN BULANAN JULI

2026

(021) 22859672

www.ptun-jakarta.go.id

**Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo
Gebang, Jakarta Timur, 13950**

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Dasar	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Jenis Laporan	1
 BAB II. PELAKSANAAN TUGAS	2
A. Kesekretariatan	2
B. Kepaniteraan	17
 BAB III. TELAAHAN	27
 BAB IV. KESIMPULAN, USUL DAN SARAN	28



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Februari 1991, Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) resmi beroperasi, salah satunya adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dengan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Bulanan ini merupakan kumpulan dari masing – masing Sub Bagian sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan juga di maksud pula sebagai bahan informasi penyempurnaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

C. JENIS LAPORAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki Jenis Laporan meliputi bidang Kesekretariatan, bidang Kepaniteraan dan bidang lainnya sebagai berikut :

1. Kesekretariatan :

- Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Sub Bagian Umum dan Keuangan
- Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

2. Kepaniteraan :

- Kepaniteraan Perkara
- Kepaniteraan Hukum



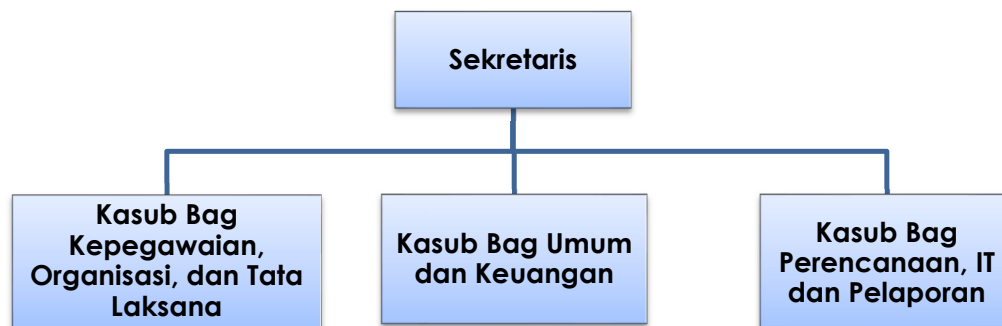
BAB II

PELAKSANAAN TUGAS

A. KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan PTUN Jakarta adalah aparatur tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, SDM dan Saprass di lingkungan PTUN Jakarta.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :



- SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

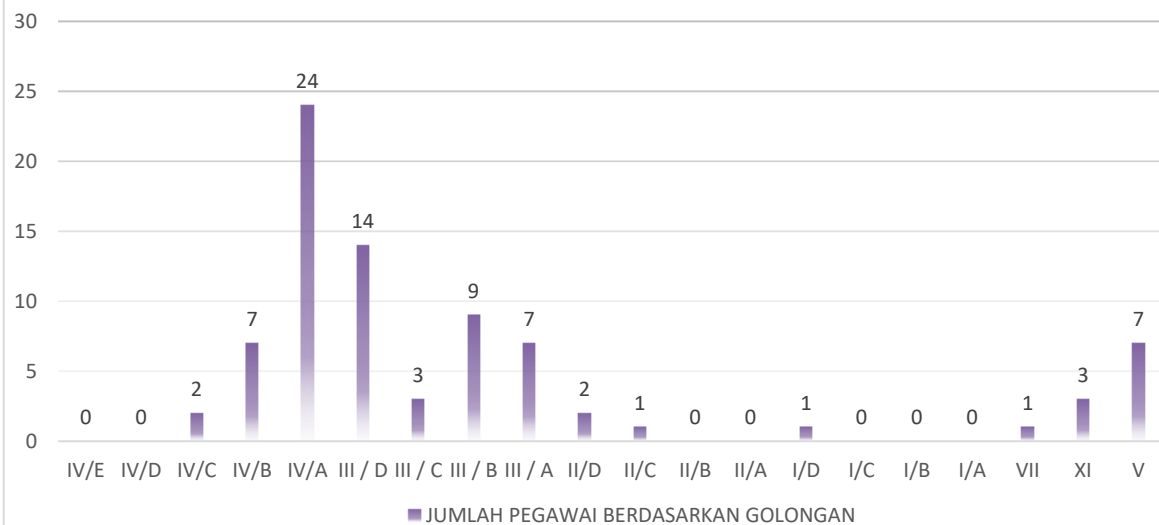
a. Jumlah Pegawai

Jumlah Seluruh Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Juli 2026 adalah 70 orang PNS, 11 orang PPPK, yang terdiri dari Laki – Laki yang berjumlah 51 orang dan perempuan 20 orang, adapun rincian sebagai berikut:



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



Mutasi

Mutasi Kedalam Wilayah :

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.	KETUA PTUN SERANG	WAKIL KETUA PTUN JAKARTA	TMT 6 JULI 2026
2.	KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.	HAKIM PTUN SURABAYA	HAKIM PTUN JAKARTA	TMT 13 JULI 2026
3.	ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.	HAKIM PTUN SURABAYA	HAKIM PTUN JAKARTA	TMT 14 JULI 2026
4.	CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.	HAKIM PTUN SEMARANG	HAKIM PTUN JAKARTA	TMT 14 JULI 2026
5.	Dr. KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.	HAKIM PTUN BANDUNG	HAKIM PTUN JAKARTA	TMT 13 JULI 2026
6.	ALI ANWAR, S.H., M.H.	HAKIM PTUN SERANG	HAKIM PTUN JAKARTA	TMT 8 JULI 2026
7.	DAFRIAN, S.H.	HAKIM PTUN SERANG	HAKIM PTUN JAKARTA	TMT 10 JULI 2026
8.	YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.	HAKIM PTUN BANDUNG	HAKIM PTUN JAKARTA	TMT 9 JULI 2026



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Mutasi Keluar Wilayah

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.	HAKIM PTUN JAKARTA	WAKIL KETUA PTUN JAYAPURA	TMT 27 JULI 2026
2.	YUSTAN KURNIA DEWI, S.H., M.H.	HAKIM PTUN JAKARTA	WAKIL KETUA PTUN TANJUNG PINANG	TMT 31 JULI 2026
3.	HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.	HAKIM PTUN JAKARTA	WAKIL KETUA PTUN BRNGKULU	TMT 27 JULI 2026
4.	YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.	HAKIM PTUN JAKARTA	WAKIL KETUA PTUN DENPASAR	TMT 22 JULI 2026
5.	HARISTOV ASZADHA, S.H., M.H	HAKIM PTUN JAKARTA	WAKIL KETUA PTUN JAMBI	TMT 20 JULI 2026
6.	ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.	HAKIM PTUN JAKARTA	HAKIM PTUN SURABAYA	TMT 27 JULI 2026
7.	DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.	HAKIM PTUN JAKARTA	HAKIM PTUN BANDUNG	TMT 22 JULI 2026
8.	FILDY, S.H., M.H.	HAKIM PTUN JAKARTA	HAKIM PTUN MEDAN	TMT 29 JULI 2026
9.	NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H.	HAKIM PTUN JAKARTA	HAKIM PTUN SEMARANG	TMT 20 JULI 2026

DATA HAKIM / PEGAWAI BARU:

NO	NAMA	JABATAN	PENEMPATAN	KET
1.	Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.	WAKIL KETUA PTUN JAKARTA	-	TMT 6 JULI 2026
2.	KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.	HAKIM PTUN JAKARTA	-	TMT 13JULI 2026
3.	ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.	HAKIM PTUN JAKARTA	-	TMT 14 JULI 2026
4.	CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.	HAKIM PTUN JAKARTA	-	TMT 14 JULI 2026



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

5.	Dr. KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.	HAKIM PTUN JAKARTA	-	TMT 13 JULI 2026
6.	ALI ANWAR, S.H., M.H.	HAKIM PTUN JAKARTA	-	TMT 8 JULI 2026
7.	DAFRIAN, S.H.	HAKIM PTUN JAKARTA	-	TMT 10 JULI 2026
8.	YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.	HAKIM PTUN JAKARTA	-	TMT 9 JULI 2026

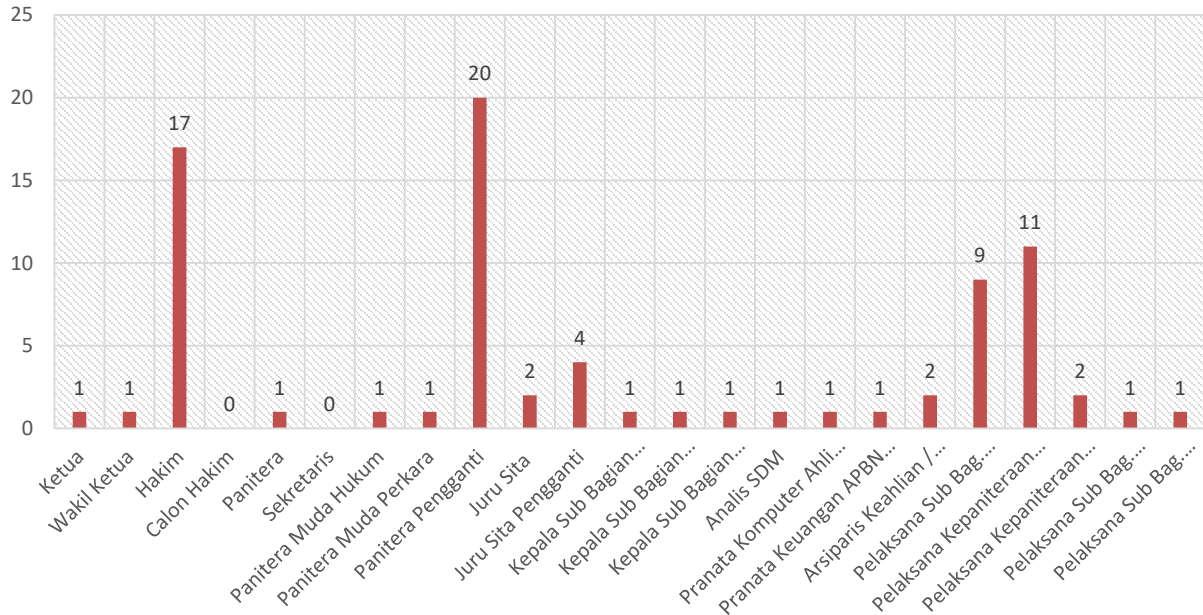
PELANTIKAN / PENGANGKATAN JABATAN BARU

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
1.	Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.	KETUA PTUN SERANG	WAKIL KETUA PTUN JAKARTA	TMT 6 JULI 2026

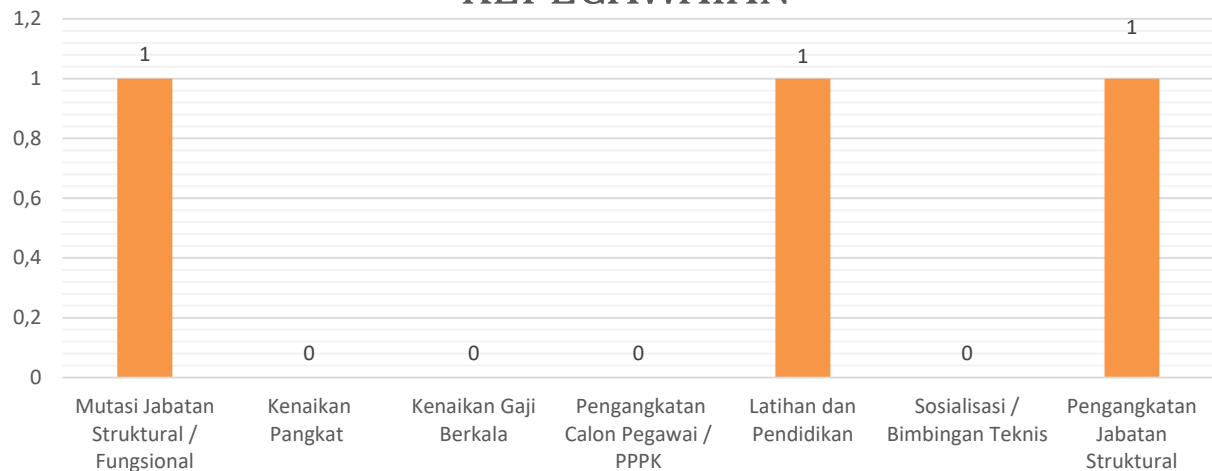


LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

JABATAN FUNSIONAL / STRUKTURAL



KEPEGAWAIAN



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

a. Umum

1. Tata Persuratan :

Surat Masuk

No.	SUB. BAGIAN	SURAT MASUK				J U M L A H
		DARI	BIASA	PENTING	RAHASIA	
1	PERSURATAN	MAHKAMAH AGUNG RI	14	—	—	14
2		PTTUN JAKARTA	3	—	—	3
3		BALITBANG DIKLAT KUMDIL	1	—	—	1
4		DIRJEND. BADIMIL TUN	4	—	—	4
5		KOMISI YUDISIAL	1	—	1	2
6		PERKARA / LAIN-LAIN	144	—	—	144
7		UMUM / LAIN-LAIN	59	—	—	59
TOTAL						227

Surat Keluar

NO	SUB	SURAT			JUMLAH
		BIASA	PENTING	RAHASIA	
1	Sub Bagian Kepegawaian dan Otala	123	0	0	123
2	Sub Bagian Umum dan Keuangan	64	0	0	64
3	Sub Perencanaa IT,Pelaporan	5	0	0	5
4	Kepaniteraan Muda Perkara	86	0	0	86
5	Kepaniteraan Muda Hukum	43	0	0	43
6	Lain - Lain	0	0	0	0
TOTAL					321

2) Tata Kearsipan :

Arsip - arsip yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertata dengan tertib melalui media penyimpanan, seperti file Ordner, Rak Arsip, Lemari Besi dan Arsip Data Komputer (ADK) sehingga memudahkan dalam pencarian.

3) Inventaris dan Persediaan :

Inventaris dan persediaan kantor dikelola dan di bukukan sesuai petunjuk yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yakni menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan aplikasi Persediaan.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Untuk bulan Juli Tahun 2026 aset Inventaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pengadaan barang / jasa sebagai berikut :

No	Nama Barang	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Jumlah
1	A.C. Split	4		28	32
2	Acces Point	5			5
3	Air Conditioning (AC)	18			18
4	Amplifier			3	3
5	Asbak Tinggi			1	1
6	Audio Mixing Console	1			1
7	Bangku Panjang Besi/Metal	7		17	24
8	Bracket Standing Peralatan	8			8
9	Brandkas			1	1
10	Buffet			1	1
11	Buku Lainnya	18			18
12	Camera Conference	1			1
13	Camera Digital	2			2
14	CCTV - Camera Control Television System	26			26
15	Digital LED Running Text	1			1
16	Dispenser	7			7
17	Facsimile	2			2
18	Filing Cabinet Besi	41		1	42
19	Filing Sealing	73			73
20	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	4			4
21	Gedung Pos Jaga Permanen	1			1
22	Genset	1			1
23	Jam Mekanis			6	6
24	Kipas Angin		3		3
25	Komponen/Alat Pengolah Data	26			26
26	Komputer Jaringan Lainnya	29			29
27	Kursi Besi/Metal	606		1	607
28	Kursi Kayu	55		14	69
29	Lambang Garuda Pancasila	6			6
30	Lambang Instansi	7			7
31	Lap Top	9			9
32	Layar Film/Projector	1			1
33	LCD Monitor	1			1
34	LCD Projector/Infocus	1			1
35	Lemari Besi/Metal	17	8	7	32
36	Lemari Kayu	2		22	24
37	Lemari Penyimpan	35			35
38	Loudspeaker	4		5	9
39	Meja Kerja Kayu	173		28	201
40	Meja Komputer			3	3
41	Meja Makan Besi	5			5
42	Meja Rapat	39			39
43	Meja Resepsionis	1		1	2
44	Mesin Absensi	1			1



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

45	Mesin Antrian	2			2
46	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1			1
47	Microphone	13			13
48	Microphone/Wireless MIC	1			1
49	Mimbar/Podium	1			1
50	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1			1
51	Mixer	3			3
52	Mixer Sound Sistem	1			1
53	Modem	1			1
54	Monografi	2			2
55	Movitex Board	1			1
56	Note Book	23			23
57	P.C Unit	42			42
58	Palu Sidang	1		5	6
59	Panggung	2			2
60	Papan Gambar	1			1
61	Papan Pengumuman	6			6
62	Peralatan Komputer Lainnya	2			2
63	Perkakas Kantor Lainnya	10			10
64	Pesawat Telephone	18		24	42
65	Piagam	3			3
66	Piala	12			12
67	Printer (Peralatan Personal Komputer)	29		10	39
68	Public Address Branch Exchange (PABX)	1			1
69	Rak Besi	134		22	156
70	Rak Server	1			1
71	Router	5			5
72	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen		2		2
73	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen		2	2	4
74	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	8			8
75	Sedan	2		1	3
76	Sepeda Motor	7	1		8
77	Server	3			3
78	Sofa	27			27
79	Software Komputer		4		4
80	Sound System	1			1
81	Stempel Timbul/Bulat	1			1
82	Tabung Pemadam Api	9			9
83	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	1			1
84	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	4			4
85	Tangga Aluminium	1			1
86	Telepon Digital	4			4
87	Televisi			1	1
88	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1		1	2
89	Wireless	1			1
90	Workstation	1			1
Total		1626	20	205	1851



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

4) Perpustakaan :

Untuk Bulan Juli 2026 Perpustakaan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada penerimaan buku atau majalah yang masuk.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

b. Keuangan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 01

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juli 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 1 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	40,801,837,000	0	25,974,938,451	2,717,208,633	28,692,147,084	70.32 %	12,109,689,916
WA Program Dukungan Manajemen	40,801,837,000	0	25,974,938,451	2,717,208,633	28,692,147,084	70.32 %	12,109,689,916
WA.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
EBB.951 Layanan Sarana Internal	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
053.0A Pengadaan Meubelair	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
000001. Pengadaan Meja dan Kursi CPNS	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
WA.6986 Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Bando dan Tingkat Pertama	40,781,837,000	0	25,964,938,451	2,717,208,633	28,672,147,084	70.31 %	12,109,689,916
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	40,781,837,000	0	25,964,938,451	2,717,208,633	28,671,998,084	70.31 %	12,109,540,916
EBA.962 Layanan Umum	1,440,000	0	1,400,000	0	1,400,000	97.22 %	40,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1,440,000	0	1,400,000	0	1,400,000	97.22 %	40,000
005.0A Layanan Sarana Dan Prasarana Internal Ekstrakomptabel	1,440,000	0	1,400,000	0	1,400,000	97.22 %	40,000
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,440,000	0	1,400,000	0	1,400,000	97.22 %	40,000
000007. Printer	1,440,000	0	1,400,000	0	1,400,000	97.22 %	40,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	40,780,097,000	0	25,963,387,451	2,717,208,633	28,670,596,084	70.31 %	12,109,500,916
001 Gaji dan Tunjangan	35,293,269,000	0	23,022,851,523	2,445,876,832	25,468,728,355	72.16 %	9,824,540,645
001.0A GAJI DAN TUNJANGAN	35,293,269,000	0	23,022,851,523	2,445,876,832	25,468,728,355	72.16 %	9,824,540,645
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	4,373,990,000	0	2,774,860,300	324,888,900	3,099,549,200	70.86 %	1,274,440,800
000002. Belanja Gaji Pokok PNS	423,548,000	0	1,240,340,300	0	1,240,340,300	292.85	-816,792,300
000003. Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 14)	2,000	0	307,289,300	0	307,289,300	15.364	-307,287,300
000004. Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 13)	323,873,000	0	0	0	0	0.00 %	323,873,000
000102. Belanja Gaji Pokok PNS (BA BUN)	3,626,567,000	0	1,227,230,700	324,888,900	1,551,919,600	42.79 %	2,074,647,400
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	60,000	0	32,370	3,451	35,821	59.70 %	24,179
000005. Belanja Pembulatan Gaji PNS	50,000	0	25,310	3,451	28,761	57.52 %	21,239

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juli 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 2 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000006. Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 13)	5,000	0	3,424	0	3,424	68.48 %	1,576
000007. Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 14)	5,000	0	3,636	0	3,636	72.72 %	1,364
511121 Belanja Tunj. Suami/istri PNS	367,458,000	0	212,462,656	24,307,130	236,769,786	64.43 %	130,688,214
000008. Belanja Tunjangan Suami/istri PNS	314,964,000	0	165,551,510	24,307,130	189,858,640	60.28 %	125,105,360
000009. Belanja Tunjangan Suami/istri PNS (Gaji ke 13)	26,247,000	0	23,290,458	0	23,290,458	88.74 %	2,956,542
000010. Belanja Tunjangan Suami/istri PNS (Gaji ke 14)	26,247,000	0	23,620,688	0	23,620,688	89.99 %	2,626,312
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	118,370,000	0	71,696,026	8,733,280	80,429,306	67.95 %	37,940,694
000011. Belanja Tunjangan Anak PNS	101,460,000	0	55,856,352	8,733,280	64,589,632	63.66 %	36,870,368
000012. Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 13)	8,455,000	0	7,915,718	0	7,915,718	93.62 %	539,282
000013. Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 14)	8,455,000	0	7,923,956	0	7,923,956	93.72 %	531,044
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	43,200,000	0	18,360,000	1,620,000	19,980,000	46.25 %	23,220,000
000014. Belanja Tunjangan Struktural PNS	37,440,000	0	13,860,000	1,620,000	15,480,000	41.35 %	21,960,000
000015. Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	2,880,000	0	1,620,000	0	1,620,000	56.25 %	1,260,000
000016. Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	2,880,000	0	2,880,000	0	2,880,000	100.00	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	190,337,000	0	121,699,000	14,128,000	135,827,000	71.36 %	54,510,000
000017. Belanja Tunj. Fungsional PNS	163,200,000	0	94,918,000	14,128,000	109,047,000	66.82 %	54,153,000
000018. Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	13,600,000	0	13,390,000	0	13,390,000	98.46 %	210,000
000019. Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	13,537,000	0	13,390,000	0	13,390,000	98.91 %	147,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	140,000,000	0	22,210,929	123,202	22,334,131	15.95 %	117,665,869
000020. Belanja Tunj. PPh PNS	120,000,000	0	835,876	123,202	839,078	0.80 %	119,040,922
000021. Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	10,000,000	0	10,998,508	0	10,998,508	109.99	-998,508
000022. Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	10,000,000	0	10,376,547	0	10,376,547	103.77	-376,547
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	257,525,000	0	145,853,880	17,018,700	162,872,580	63.25 %	94,652,420
000023. Belanja Tunj. Beras PNS	257,525,000	0	145,853,880	17,018,700	162,872,580	63.25 %	94,652,420
511129 Belanja Uang Makan PNS	889,741,000	0	290,886,000	48,430,000	339,316,000	38.14 %	550,425,000
000024. Gol IV (29 org x 22 hr x 12 Bln)	308,965,000	0	146,944,000	23,821,000	170,765,000	55.27 %	138,200,000
000025. Gol III (60 org x 22 Hr x 12 Bln)	480,730,000	0	127,317,000	22,089,000	149,406,000	31.08 %	331,324,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juli 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 3 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000026. Gol II (10 org x 22 Hr x 12 Bln)	90,951,000	0	12,985,000	1,890,000	14,875,000	16.35 %	78,076,000
000027. Gol I (1 org x 22 Hr x 12 Bln)	9,095,000	0	3,840,000	630,000	4,270,000	46.95 %	4,825,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	73,654,000	0	25,020,000	2,570,000	27,590,000	37.46 %	46,064,000
000028. Belanja Tunjangan Umum PNS	63,845,000	0	19,500,000	2,570,000	22,070,000	34.57 %	41,775,000
000029. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	4,902,000	0	2,760,000	0	2,760,000	56.30 %	2,142,000
000030. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	4,907,000	0	2,760,000	0	2,760,000	56.25 %	2,147,000
511324 Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	5,459,313,000	0	3,036,073,308	363,218,547	4,299,291,855	78.75 %	1,160,021,145
000031. Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	1,208,703,000	0	1,050,684,765	0	1,050,684,765	86.93 %	158,018,235
000032. Belanja Tunjangan PPH Pejabat Negara (gaji ke 13)	177,014,000	0	0	0	0	0.00 %	177,014,000
000033. Belanja Tunjangan PPH Pejabat Negara (gaji ke 14)	410,000,000	0	471,166,656	0	471,166,656	114.92 %	-61,166,656
000103. Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara (BA BUN)	3,663,596,000	0	2,414,221,887	363,218,547	2,777,440,434	75.81 %	886,155,566
511339 Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	23,225,500,000	0	15,073,300,000	1,598,600,000	16,671,900,000	71.78 %	6,553,600,000
000034. Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	8,394,845,000	0	4,840,600,000	0	4,840,600,000	57.66 %	3,554,245,000
000035. Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (gaji ke 13)	531,100,000	0	0	0	0	0.00 %	531,100,000
000036. Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (gaji ke 14)	2,021,600,000	0	1,409,500,000	0	1,409,500,000	69.72 %	612,100,000
000104. Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (BA BUN)	9,635,255,000	0	6,292,700,000	1,598,600,000	7,891,300,000	81.90 %	1,743,955,000
000105. Tunjangan Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (BA BUN)	2,642,700,000	0	2,530,500,000	0	2,530,500,000	95.75 %	112,200,000
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	39,600,000	0	245,178,225	29,450,500	274,628,725	693.51 %	-235,028,725
000037. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	2,850,000	0	16,199,650	0	16,199,650	566.62 %	-13,340,650
000038. Belanja Gaji Pokok PPPK	33,882,000	0	206,153,500	29,450,500	235,604,000	695.37 %	-201,722,000
000039. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	2,850,000	0	22,825,075	0	22,825,075	798.36 %	-19,966,075
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7,000	0	7,600	920	8,520	121.71 %	-1,520
000040. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1,000	0	721	0	721	72.10 %	279
000041. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1,000	0	439	0	439	43.90 %	561
000042. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,000	0	6,440	920	7,360	147.20 %	-2,360

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juli 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 4 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,704,000	0	11,217,441	1,359,690	12,577,131	339.56 %	-8,873,131
000043. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK (gaji ke 13)	264,000	0	1,019,766	0	1,019,766	386.28 %	-755,766
000044. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,176,000	0	9,517,830	1,359,690	10,877,520	342.49 %	-7,701,520
000045. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK (gaji ke 14)	264,000	0	679,845	0	679,845	257.52 %	-415,845
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,456,000	0	2,600,993	315,272	2,916,265	200.29 %	-1,460,265
000046. Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,250,000	0	2,206,904	315,272	2,522,176	201.77 %	-1,272,176
000047. Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 13)	103,000	0	236,453	0	236,453	229.57 %	-133,453
000048. Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 14)	103,000	0	157,636	0	157,636	153.04 %	-54,636
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,900,000	0	3,150,000	350,000	3,500,000	71.43 %	1,400,000
000049. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,200,000	0	2,450,000	350,000	2,800,000	66.67 %	1,400,000
000050. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 13)	350,000	0	350,000	0	350,000	100.00 %	0
000051. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 14)	350,000	0	350,000	0	350,000	100.00 %	0
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,044,000	0	13,198,545	1,593,240	14,791,785	365.77 %	-10,747,785
000052. Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,466,000	0	11,152,680	1,593,240	12,745,920	367.74 %	-9,279,920
000053. Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 13)	289,000	0	1,213,035	0	1,213,035	419.74 %	-924,035
000054. Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 14)	289,000	0	832,830	0	832,830	288.18 %	-543,830
511628 Belanja Uang Makan PPPK	100,400,000	0	40,153,000	7,561,000	47,714,000	47.52 %	52,686,000
000055. Belanja Uang Makan PPPK	100,400,000	0	40,153,000	7,561,000	47,714,000	47.52 %	52,686,000
511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK	10,000	0	14,891,250	1,805,000	16,696,250	166.962 %	-16,686,250
000056. Belanja Tunjangan Umum PPPK	10,000	0	14,891,250	1,805,000	16,696,250	166.962 %	-16,686,250
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5,486,828,000	0	2,630,535,928	271,331,801	3,201,867,729	58.36 %	2,284,960,271
002.0A Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	1,623,646,000	0	1,438,537,289	19,879,688	1,458,416,977	89.82 %	165,229,023
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	1,543,646,000	0	1,403,751,176	13,996,743	1,417,747,919	91.84 %	125,898,081
000057. Petugas Kebersihan	654,576,000	0	654,576,000	0	654,576,000	100.00 %	0
000058. Satpam	720,096,000	0	720,096,000	0	720,096,000	100.00 %	0
000059. Tambahan Satpam (1 Orang x 8 Bulan)	55,392,000	0	2,768,400	0	2,768,400	5.00 %	52,623,600
000101. Air minum Kemasan / Galon	6,000,000	0	1,540,000	780,000	2,320,000	38.67 %	3,680,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juli 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 5 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000106. Retribusi Sampah	9,000,000	0	2,900,000	1,750,000	4,650,000	51.67 %	4,350,000
000109. Keperluan sehari-hari Perkantoran	43,190,000	0	21,870,776	11,466,743	33,337,519	77.19 %	9,852,481
000111. Pengemudi (1 Orang x 8 Bulan)	55,392,000	0	0	0	0	0.00 %	55,392,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	80,000,000	0	34,786,113	5,882,945	40,669,058	50.84 %	39,330,942
000060. Biaya perkantoran sehari-hari (91 Org)	80,000,000	0	34,786,113	5,882,945	40,669,058	50.84 %	39,330,942
002.08 LANGGANAN DAYA JASA	1,108,491,000	0	607,925,842	79,152,253	687,077,895	61.98 %	421,413,105
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	194,000,000	0	183,466,111	341,607	183,807,718	94.75 %	10,192,282
000061. Langganan Internet	190,000,000	0	181,500,000	0	181,500,000	95.53 %	8,500,000
000062. Lisensi Video Conference	4,000,000	0	1,966,111	341,607	2,307,718	57.69 %	1,692,282
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,200,000	0	2,501,500	94,000	2,595,500	61.80 %	1,604,500
000063. Biaya Pengiriman Surat Dinas	4,200,000	0	2,501,500	94,000	2,595,500	61.80 %	1,604,500
522111 Belanja Langganan Listrik	875,291,000	0	393,998,331	78,716,646	472,714,977	54.01 %	402,576,023
000064. Belanja Langganan Listrik	875,291,000	0	393,998,331	78,716,646	472,714,977	54.01 %	402,576,023
522112 Belanja Langganan Telepon	6,000,000	0	1,983,700	0	1,983,700	33.06 %	4,016,300
000065. Langganan Telephone	6,000,000	0	1,983,700	0	1,983,700	33.06 %	4,016,300
522113 Belanja Langganan Air	3,000,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000,000
000066. Langganan Air	3,000,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000,000
522141 Belanja Sewa	26,000,000	0	25,976,000	0	25,976,000	99.91 %	24,000
000067. Langganan Web Hosting	26,000,000	0	25,976,000	0	25,976,000	99.91 %	24,000
002.0C Pemeliharaan Kantor	1,524,251,000	0	426,730,553	156,219,860	582,950,413	38.25 %	941,300,587
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	905,993,000	0	271,687,859	134,025,460	405,713,319	44.78 %	500,279,681
000068. Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan	905,993,000	0	271,687,859	134,025,460	405,713,319	44.78 %	500,279,681
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	42,750,000	0	2,500,000	0	2,500,000	5.85 %	40,250,000
000069. Pemeliharaan Rumah Dinas (4 Unit)	42,750,000	0	2,500,000	0	2,500,000	5.85 %	40,250,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	575,508,000	0	152,542,694	22,194,400	174,737,094	30.36 %	400,770,906
000070. Pemeliharaan Lift	57,000,000	0	51,948,000	0	51,948,000	91.14 %	5,052,000
000071. Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas	19,000,000	0	13,300,000	2,297,511	15,597,511	82.09 %	3,402,489

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juli 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 6 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
Pejabat	19,000,000	0	13,300,000	2,297,511			3,402,489
000072. Pemeliharaan AC Cassete	83,076,000	0	39,610,000	13,768,330	53,378,330	64.25 %	29,697,670
000073. Pemeliharaan Laptop	15,257,000	0	650,000	160,200	810,200	5.31 %	14,446,800
000074. Pemeliharaan PC	29,820,000	0	3,683,520	0	3,683,520	12.35 %	26,136,480
000075. Pemeliharaan Printer	19,665,000	0	4,397,500	0	4,397,500	22.36 %	15,267,500
000076. Pemeliharaan AC Split	36,708,000	0	13,716,359	1,500,000	15,216,359	41.45 %	21,491,641
000077. Pemeliharaan Mesin Pompa	6,982,000	0	0	0	0	0.00 %	6,982,000
000078. Kendaraan Roda 2	33,300,000	0	6,484,920	145,000	6,629,920	19.91 %	26,670,080
000079. Kendaraan Roda 4	169,700,000	0	18,752,395	4,323,359	23,075,754	13.60 %	146,624,246
000108. Pemeliharaan barang elektronik lainnya	5,000,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000,000
000110. Pemeliharaan Peralatan Mesin	100,000,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000,000
002.0D Operasional Lainnya	203,310,000	0	31,350,000	6,630,000	37,980,000	18.68 %	165,330,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	123,750,000	0	0	0	0	0.00 %	123,750,000
000080. Pakaian Dinas Hakim 28 Org x 2 Stel	31,616,000	0	0	0	0	0.00 %	31,616,000
000081. Pakaian Dinas Pegawai 60 Org x 2 Stel	72,960,000	0	0	0	0	0.00 %	72,960,000
000082. Pakaian Dinas CPNS 4 Org x 2 Stel	5,798,000	0	0	0	0	0.00 %	5,798,000
000083. Pakaian Dinas PPPK 11 Org x 2 Stel	13,376,000	0	0	0	0	0.00 %	13,376,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	79,560,000	0	31,350,000	6,630,000	37,980,000	47.74 %	41,580,000
000084. Honor KPA	21,600,000	0	7,200,000	1,800,000	9,000,000	41.67 %	12,600,000
000085. Honor PPK	21,000,000	0	8,750,000	1,750,000	10,500,000	50.00 %	10,500,000
000086. Honor Penguji Tagihan Penandatanganan SPM	9,000,000	0	3,750,000	750,000	4,500,000	50.00 %	4,500,000
000087. Honor Bendahara Penerimaan	2,400,000	0	1,000,000	200,000	1,200,000	50.00 %	1,200,000
000088. Honor Bendahara Pengeluaran	7,920,000	0	3,300,000	660,000	3,960,000	50.00 %	3,960,000
000089. Honor Staf Keuangan (2 org x 12 Bin)	11,760,000	0	4,900,000	980,000	5,880,000	50.00 %	5,880,000
000090. Honor PPABP	5,880,000	0	2,450,000	490,000	2,940,000	50.00 %	2,940,000
002.0E HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM	995,280,000	0	412,650,000	9,450,000	422,100,000	42.41 %	573,180,000
522141 Belanja Sewa	995,280,000	0	412,650,000	9,450,000	422,100,000	42.41 %	573,180,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juli 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 7 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000091. Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim (10 Orang x 12 Bln)	995,280,000	0	412,650,000	9,450,000	422,100,000	42.41 %	573,180,000
002.0G Konsultasi ke Pusat/Tingkat Bawah	31,850,000	0	13,342,444	0	13,342,444	41.89 %	18,507,556
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,100,000	0	11,392,444	0	11,392,444	45.39 %	13,707,556
000092. Transportasi (2 org x 1 kegiatan)	1,800,000	0	0	0	0	0.00 %	1,800,000
000093. Uang Harian (3 org x 3 hari x 1 kegiatan)	4,950,000	0	3,240,000	0	3,240,000	65.45 %	1,710,000
000094. Tiket (5 org x 1 hari x 1 kegiatan)	7,850,000	0	0	0	0	0.00 %	7,850,000
000095. Penginapan (5 org x 2 hari x 1 kegiatan)	10,500,000	0	8,152,444	0	8,152,444	77.64 %	2,347,556
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,750,000	0	1,950,000	0	1,950,000	28.89 %	4,800,000
000096. Perjalanan Dinas Dalam Kota (9 Org x 5 keg) termasuk Konsultasi ke KPPN/KANWIL DJPb/KPNL/KANWIL DJKNB/KNBKD	6,750,000	0	1,950,000	0	1,950,000	28.89 %	4,800,000
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	300,000	0	151,000	0	151,000	50.33 %	149,000
EBD.Z25 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300,000	0	151,000	0	151,000	50.33 %	149,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	300,000	0	151,000	0	151,000	50.33 %	149,000
005.0A Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300,000	0	151,000	0	151,000	50.33 %	149,000
521211 Belanja Bahan	300,000	0	151,000	0	151,000	50.33 %	149,000
000098. Cetak Bahan Pemantauan dan Evaluasi	300,000	0	151,000	0	151,000	50.33 %	149,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 05

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juli 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Satuan Kerja : 526733 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 1 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	70,602,000	17,690,000	15,000,000	4,800,000	19,800,000	28.04 %	33,112,000
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	70,602,000	17,690,000	15,000,000	4,800,000	19,800,000	28.04 %	33,112,000
BF.1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	70,602,000	17,690,000	15,000,000	4,800,000	19,800,000	28.04 %	33,112,000
AEA Koordinasi	15,496,000	0	3,000,000	2,400,000	5,400,000	34.85 %	10,096,000
AEA.002 Dukungan Penyelesaian Perkara	15,496,000	0	3,000,000	2,400,000	5,400,000	34.85 %	10,096,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	15,496,000	0	3,000,000	2,400,000	5,400,000	34.85 %	10,096,000
005.0A Pelaksanaan Pengamanan Sidang	15,496,000	0	3,000,000	2,400,000	5,400,000	34.85 %	10,096,000
521211 Belanja Bahan	15,496,000	0	3,000,000	2,400,000	5,400,000	34.85 %	10,096,000
000001. Konsumsi Pengamanan Sidang (25 org x25 kali)	15,496,000	0	3,000,000	2,400,000	5,400,000	34.85 %	10,096,000
BCA Perkara Hukum Perseorangan	4,200,000	0	0	0	0	0.00 %	4,200,000
BCA.001 Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	4,200,000	0	0	0	0	0.00 %	4,200,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	4,200,000	0	0	0	0	0.00 %	4,200,000
005.0A Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara	4,200,000	0	0	0	0	0.00 %	4,200,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,200,000	0	0	0	0	0.00 %	1,200,000
000002. Pengiriman Pemberitahuan/Panggilan	1,200,000	0	0	0	0	0.00 %	1,200,000
521211 Belanja Bahan	3,000,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000,000
000003. Pengandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
000004. Alat Tulis Kantor	2,000,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000,000
QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	33,216,000	0	12,000,000	2,400,000	14,400,000	43.35 %	18,816,000
QBA.001 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	33,216,000	0	12,000,000	2,400,000	14,400,000	43.35 %	18,816,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	33,216,000	0	12,000,000	2,400,000	14,400,000	43.35 %	18,816,000
005.0A Pos Bantuan Hukum	33,216,000	0	12,000,000	2,400,000	14,400,000	43.35 %	18,816,000
521211 Belanja Bahan	4,416,000	0	0	0	0	0.00 %	4,416,000
000005. ATK Layanan Pos Bantuan Hukum	4,416,000	0	0	0	0	0.00 %	4,416,000
522131 Belanja Jasa Konsultan	28,800,000	0	12,000,000	2,400,000	14,400,000	50.00 %	14,400,000
000006. Jasa Layanan Konsultan Hukum	28,800,000	0	12,000,000	2,400,000	14,400,000	50.00 %	14,400,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juli 2026

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Satuan Kerja : 526733 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 2 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
QCA Perkara Hukum Perseorangan	17,690,000	17,690,000	0	0	0	0.00 %	0
QCA.002 Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	17,690,000	17,690,000	0	0	0	0.00 %	0
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	17,690,000	17,690,000	0	0	0	0.00 %	0
005.0A Sidang di luar Gedung Pengadilan	17,690,000	17,690,000	0	0	0	0.00 %	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	300,000	300,000	0	0	0	0.00 %	0
000007. Biaya Uang Kebersihan (3 Orang x 1 Kali)	300,000	300,000	0	0	0	0.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,390,000	17,390,000	0	0	0	0.00 %	0
000008. Transportasi 7 Org x 1 Keg	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0.00 %	0
000009. Tiket 7 Org x 1 Keg	4,636,000	4,636,000	0	0	0	0.00 %	0
000010. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas (7 Orang x 1 Malam x 1 Keg)	6,944,000	6,944,000	0	0	0	0.00 %	0
000011. Uang Harian (7 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan)	3,710,000	3,710,000	0	0	0	0.00 %	0



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

a. Teknologi Informasi, pengelolaan website dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yaitu dengan melakukan pembaruan konten berita website yaitu dengan adanya Rapat Bulanan untuk Bulan Juli 2026 agenda rapat meliputi :

- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan Dalam arahannya pentingnya profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dengan berpedoman pada kode etik dan peraturan yang berlaku. Seluruh aparatur diingatkan untuk senantiasa menjunjung tinggi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Kode Etik Kepaniteraan, serta Kode Etik ASN. Selain itu, Ketua juga menguraikan kembali sejumlah regulasi penting, di antaranya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016 serta Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, sebagai pedoman dalam menjaga disiplin, pengawasan, serta penanganan pengaduan di lingkungan peradilan.
- Berdasarkan hasil pembinaan Ketua Mahkamah Agung pada kegiatan di Malang untuk seluruh Hakim dan Pegawai agar selalu professional, menjaga integritas, dan selalu disiplin serta mempunyai pola hidup sederhana dan senantiasa bijak dalam menggunakan media sosial, dengan tidak memberikan komentar ataupun tanggapan pada platform tersebut.
- Selanjutnya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan Work From Home (WFH) masih tetap berlaku. Mulai bulan depan akan diterbitkan Surat Keputusan khusus mengenai WFH, dengan ketentuan bahwa setiap Pegawai diberikan hak melaksanakan WFH sebanyak dua kali dalam satu bulan, dan terkait dengan surat pemberitahuan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), masih terdapat beberapa pegawai yang belum sesuai ketentuan, sehingga diminta untuk segera melakukan pembaruan mengingat telah diberikan hingga peringatan ke-17.
- Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan beberapa poin laporan kegiatan yang dilakukan selama bulan Juli 2026, yaitu :



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

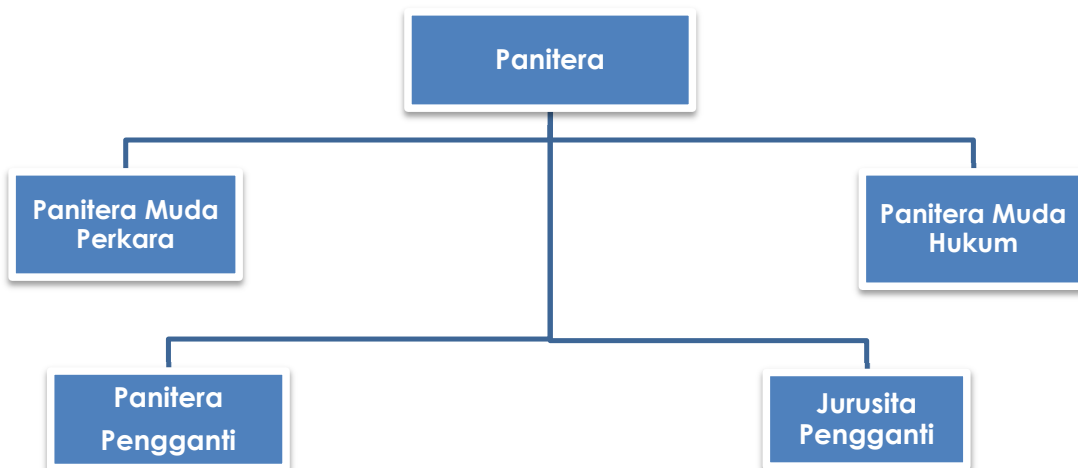
- Kepaniteraan telah melakukan kegiatan rakor pada bulan juni dan juli yang intinya membahas money SIPP, E-court, dan E-Register.
- SIPP sudah ada update terbaru yaitu 6.2.2 yang ada tambahan terbaru untuk mengupload bundle A.
- Plt. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan beberapa poin laporan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan selama bulan Juli 2026, yaitu :
 - Draft pemotongan gaji bulanan telah disusun, selanjutnya akan dikonfirmasi kepada pegawai untuk dimintakan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan atas pemotongan tersebut.
 - Plt. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta juga turut menyampaikan bahwa Total dana Bapor per bulan juli 2026 adalah sebesar : Rp. 33.053.290
- b. Pelaporan, jenis laporan yang di kerjakan pada sub bagian ini merupakan laporan yg bersifat umum pada Satuan Kerja dan laporan yang bersifat khusus terkait Kesekretariatan.



B. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah aparaturnya yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Struktur Organisasi Kepaniteraan



1. Kepaniteraan Muda Perkara

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara :

- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara TUN.
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.
- Menerima Gugatan Permohonan Banding, Kasasi, PK, Plw dan Eksekusi.
- Meneliti berkas perkara masuk.
- Mencatat setiap perkara yang diterima dalam register.
- Memberi nomor register pada surat gugatan.
- Mencatat gugatan yang diterima lewat pos.
- Mencatat perkara yang lewat untuk diteruskan kepada pengadilan yang berwenang
- Membuat SKUM setelah bayar lunas panjer perkara di bank.
- Membuat jurnal keuangan perkara.



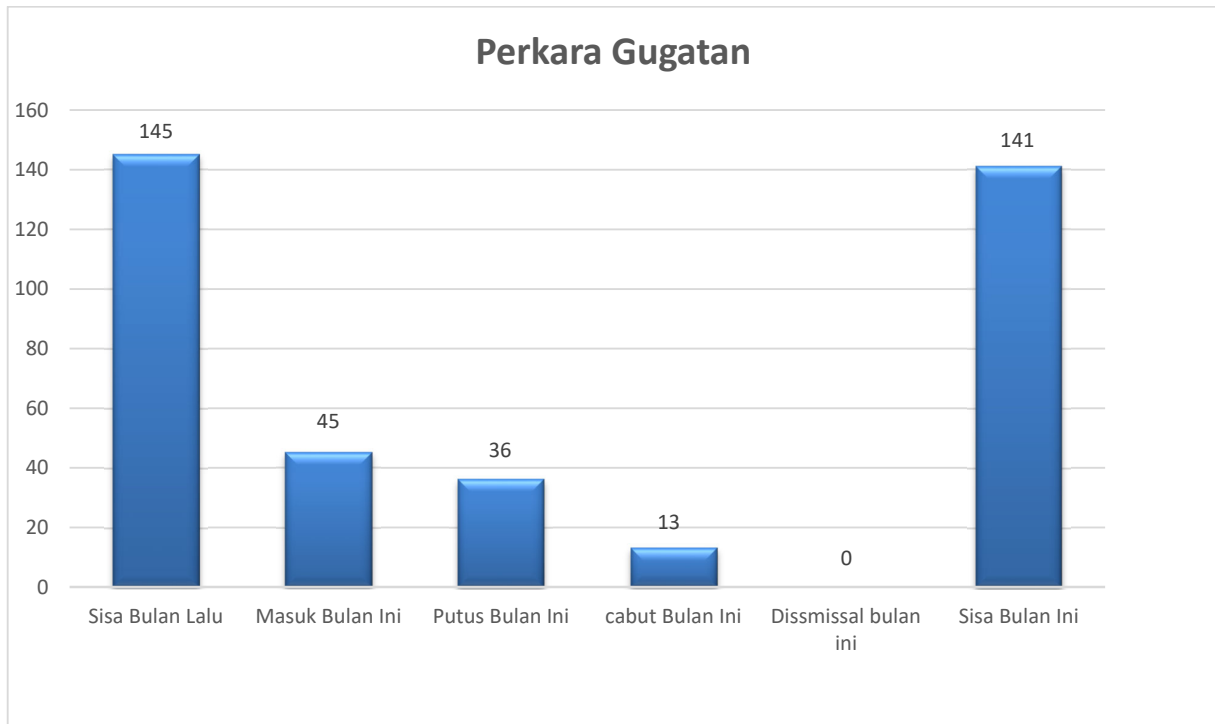
LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- Membuat Laporan bulanan keuangan perkara.
- Membuat laporan bulanan keadaan perkara.
- Membuat/memberitahukan akta/pernyataan, memori, kontra dalam perkara Banding, kasasi dan PK kepada para pihak.
- Memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas yang akan dikirim (Inzage)
- Mengirim berkas perkara Banding, kasasi dan PK (Bundel A dan B).
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku panitera pengganti, membuat berita acara dan putusan.
- Mencatat jalannya sidang yang ditetapkan oleh majelis.
- Memberitahukan isi putusan kepada para pihak.
- Menyerahkan arsip berkas perkara incraht kepada panmud Hukum.
- Melakukan bimbingan kepada staf pandmud perkara.
- Mengusulkan mutasi dalam rangka penyegaran dan karier pegawai staf pandmud perkara.
- Mengevaluasi hasil pekerjaan tahun 2026.
- Membuat SKP. 2 pegawai staf pandmud perkara
- Menyusun rencana kerja panmud perkara tahun 2026



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Kadaan Perkara

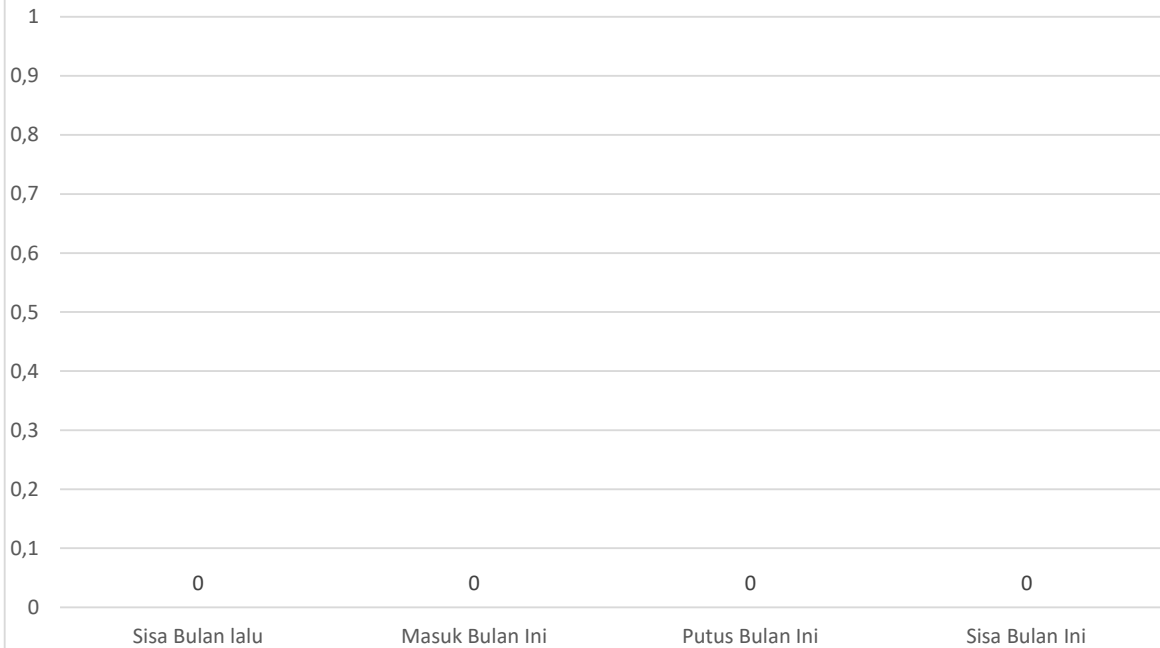


Catatan : Total Putus bulan ini adalah (di cabut + dismissal + Putus bulan ini)
 $13 + 0 + 36 = 49$ Perkara



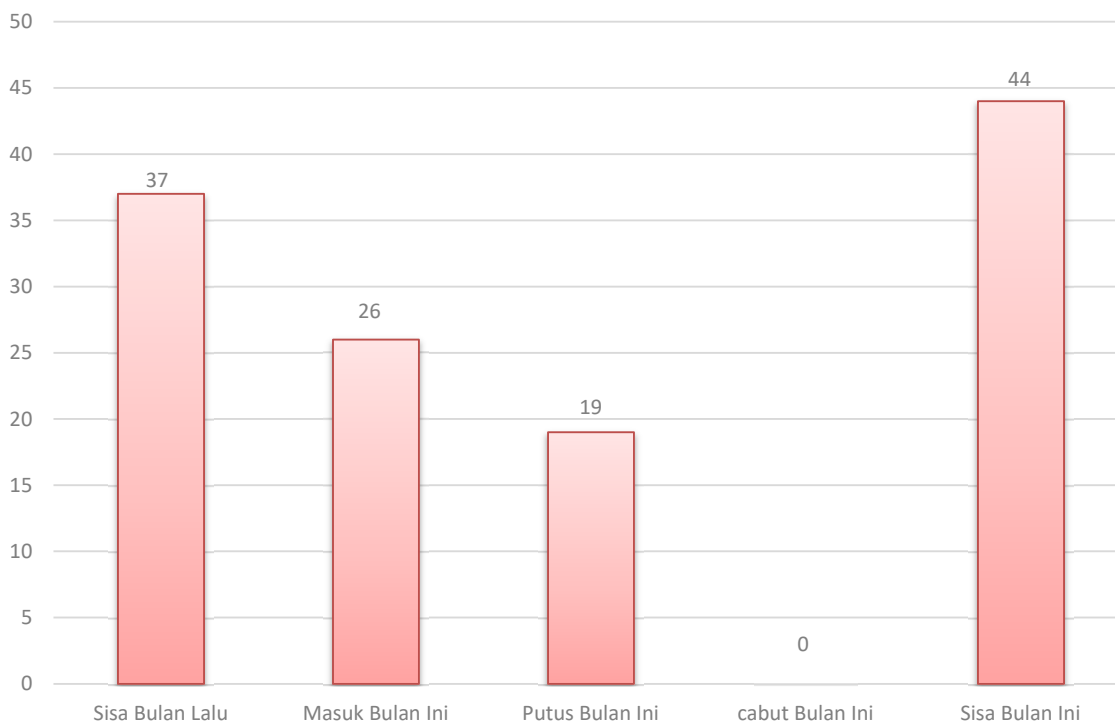
LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Perkara Perlawanan

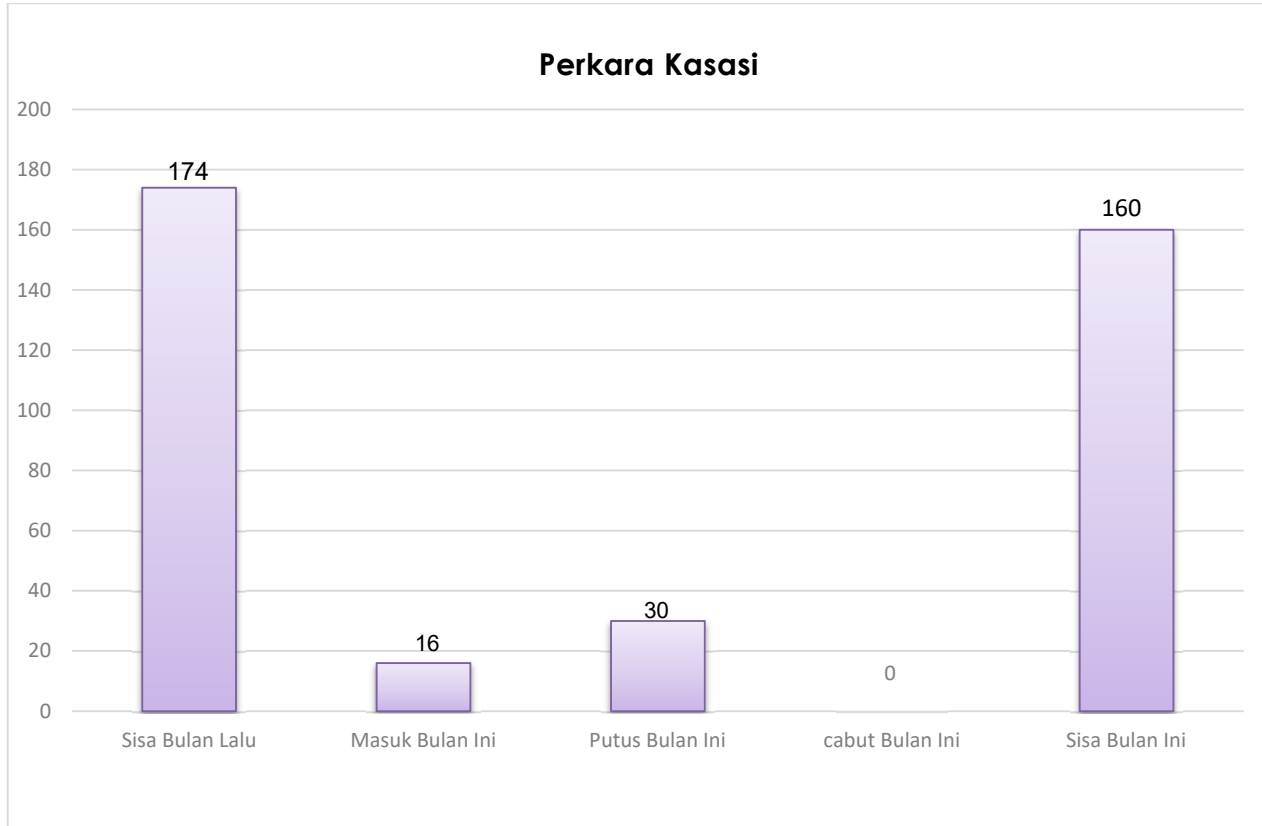


LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Perkara Banding



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

2. Kepaniteraan Muda Hukum

- Laporan Jenis Perkara Bulan Juli 2026

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 22859672

LAPORAN JENIS PERKARA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
BULAN JULI TAHUN 2026

FORMULIR LI-T2

NO	Jenis Perkara	Ssa Bulan Lalu	Perkara			Pengugat			Tergugat			Perlawanan			Putusan					Permohonan			Tema Berkas		Keterangan		
			Masuk	Dibaca	Jumlah	Pengajuan	Badan Hukum	Perorangan	Perorangan	Badan Hukum	Ditolak	Ditolak	Ditolak	Ditolak	Ditolak	Ditolak	Ditolak	Ditolak	Ditolak	Ditolak	Ditolak	Ditolak	Ditolak	Ditolak			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
A	GUGATAN																										
1	Pertanahan	17	5	1	21	5	-	-	5	-	-	-	-	2	1	6	-	9	12	5	1	-	-	-	4	4	(1 Cabut Perlawanan)
2	Kepegawaian	7	1	-	8	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	5	5	-	-	-	-	1	3	3
3	Perjanjian	21	5	-	26	1	4	5	-	-	-	-	-	1	-	5	1	7	19	3	3	1	1	5	4	4	
4	Lingkungan Hidup	4	3	-	7	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	2	-	-	-	-	1	-	
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Badan Hukum/ Parpol	18	5	-	23	2	3	5	-	-	-	-	-	2	1	2	2	7	16	4	-	-	-	-	3	12	10
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Penggantian Antar Waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Sengketa Informasi Publik/KIP	2	4	-	6	2	2	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	-	2	-	-	-	-	-	
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Fikst Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	22	6	1	27	4	2	4	2	-	-	-	-	3	-	3	2	8	19	2	1	3	-	3	1	9	
17	Merek	1	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1	
18	Lain Lain	53	15	-	68	11	4	14	1	-	-	-	-	3	2	5	1	11	57	6	6	-	-	5	5	-	
	JUMLAH	145	45	2	188	28	17	36	9	-	-	-	-	11	7	22	7	47	141	26	16	4	1	19	30	12	

Mengetahui,
DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.
Nip. 19740607 200012 1001

Jakarta, 31 Juli 2026
PANITERA,
DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.
Nip. 19731012 200003 1003

- Laporan Penanganan Pengaduan Bulan Juli 2026

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
Jakarta Timur 13950, Telp.(021) 22859672

LAPORAN BULANAN PENANGANAN PENGADUAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
BULAN JULI TAHUN 2026

L1-T5

NO	NAMA PENGADU	HAL YANG DIADUKAN	TANGGAL PENGADUAN	TINDAK LANJUT PENGADUAN	KETERANGAN
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Jakarta 31 Juli 2026
KETUA,
DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.
NIP. 19740607 200012 1 001



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

C. KEGIATAN LAIN – LAIN

1. Jakarta, — Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Menyelenggarakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Senin, 6 Juli 2026, bertempat di Ruang Aula Lantai 4 PTUN Jakarta. Kegiatan berlangsung dengan khidmat, tertib, dan lancar sebagai momentum penting dalam penguatan kepemimpinan di lingkungan PTUN Jakarta.



2. Jakarta, — Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Menyelenggarakan Pengantar Tugas Pimpinan, Hakim, Sekretaris serta Purna Bakti Pegawai pada Jumat, 3 Juli, yang bertempat di Ruang Aula Lantai 4 PTUN Jakarta. Kegiatan berlangsung dalam suasana yang penuh kehangatan, kekeluargaan, dan kebersamaan sebagai bentuk penghormatan serta apresiasi kepada para pimpinan, hakim, sekretaris, dan pegawai yang akan melanjutkan pengabdian di tempat tugas yang baru maupun yang telah memasuki masa purna bakti. Acara ini dihadiri oleh seluruh keluarga besar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, termasuk Ibu-Ibu Paguyuban PTUN Jakarta. Kehadiran seluruh unsur keluarga besar PTUN Jakarta menjadi wujud nyata rasa hormat, kebersamaan, serta dukungan kepada para insan peradilan yang telah memberikan dedikasi dan kontribusi terbaik selama bertugas di lingkungan PTUN Jakarta.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA



BAB III

TELAAHAN

Kondisi Rumah Dinas

Bahwa Rumah Negara/Dinas dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang saat ini berjumlah 6 unit, dengan kondisi 2 unit dalam keadaan rusak ringan dan 4 unit kondisinya dalam keadaan tidak layak huni/memprihatinkan seperti banyaknya atap rumah yang bocor, kusen yang lapuk, lantai keramik yang retak, tembok yang rusak. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerlukan anggaran untuk renovasi rumah dinas.

Kondisi Kendaraan Dinas

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki 12 Kendaraan Dinas

1. Kendaraan roda 4 berjumlah 4 (empat) unit. Dari jumlah tersebut, 2 (dua) unit sedang dalam proses penghapusan dari daftar inventaris. Setelah proses penghapusan selesai, PTUN Jakarta akan mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan kendaraan roda 4.
2. Kendaraan Roda 2 berjumlah 7 Unit, dalam kondisi rusak berat sebanyak 2 (dua) unit dan 5 (lima) unit dalam keadaan rusak ringan. Oleh karena itu PTUN Jakarta memerlukan tambahan anggaran perawatan dan terhadap 2 unit kendaraan rusak tersebut kami akan mengusulkan penghapusan dari barang milik negara sehingga PTUN Jakarta masih membutuhkan 2 unit kendaraan roda 2 (dua).
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta saat ini mempunyai pegawai secara keseluruhan berjumlah 73 PNS, dan 11 orang PPPK sebagian pegawai tersebut terdapat adanya jabatan rangkap, khususnya ada 3 (tiga) Panitera Pengganti dan 4 (empat) JSP yang merangkap sebagai staf pada Kepaniteraan.

Berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih memerlukan penambahan pegawai yang diperuntukan sebagai staf di Kepaniteraan dan Kesekretariatan.



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

BAB IV

KESIMPULAN, USUL DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Pelaksanaan jalannya organisasi dan tata kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Bulan Juli 2026 berjalan dengan lancar.

2. USUL DAN SARAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kami mengusulkan peningkatan Sumber Daya Manusia :

- Mohon agar diberikan Anggaran Biaya Tambahan untuk belanja PC All in One, Mesin Scanner, serta Mesin Printer.
- Mohon Penambahan Pegawai untuk ditempatkan di bidang Kesekretariatan dan di Kepaniteraan yang saat ini banyak di isi dari Pejabat Fungsional (Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti).

Mengetahui



**KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**
Ditandatangani secara elektronik

DANAN PRIAMBADA



Jakarta, 10 Agustus 2026

Sekretaris,

Meilisa Lydya, S.E., M.M., S.H
NIP. 198305112009122003



Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 1 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
1		- Rumah dinas Ketua PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi rusak berat yang terdiri dari ; • Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, serta langit-langit akan runtuh. • Membahayakan / beresiko difungsikan, • Perbaikan dengan rekonstruksi.
		
		
		





Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta		
No	Rumah Dinas 2 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
2		- Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi Rusak Ringan yang terdiri dari ; • Atap atap /plafon jebol, • Kusen yang sudah termakan rayap, • Dinding / tembok yang sudah mulai kusam dan rusak • Kaca depan rumah pecah • Pagar roboh
		
		
		
		
		



Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta		
No	Rumah Dinas 3 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
3		- Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi rusak berat yang terdiri dari ; • Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, • Kompenen penunjang lainnya rusak total • Membahayakan / beresiko difungsikan, • Perbaikan dengan rekonstruksi.
		
		
		
		
		



Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta		
No	Rumah Dinas 4 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
4		- Rumah dinas Wakil Ketua PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi rusak berat yang terdiri dari ; • Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, • Komponen penunjang lainnya rusak seperti atap dan pagar • Membahayakan / beresiko difungsikan, • Perbaikan dengan rekonstruksi.
		



KENDARAAN DINAS RODA 2

No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
1	Honda Tiger CW 200 cc		2	Honda Supra X 125 D	
		- Honda Tiger CW 200 cc - Plat Nomor B 6017 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Berat			- Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6016 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Ringan
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
3	Honda Supra X 125 D		4	Honda Supra X 125 D	
		- Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6018 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Ringan			- Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6391 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan



No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
5	Honda Supra X 125 D		6	Honda Supra X 125 D	
		- Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6392 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan			- Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6393 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Berat
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
7	Honda Supra X 125 D		8	Honda Supra X 125 D	
		- Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6394 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan			- Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6395 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan

